



**DJKN**

KEMENTERIAN KEUANGAN  
KPKNL SURAKARTA



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

## NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

<i>INTEGRITAS</i>	Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
<i>PROFESIONALISME</i>	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
<i>SINERGI</i>	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
<i>PELAYANAN</i>	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
<i>KESEMPURNAAN</i>	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## DAFTAR ISI

<b>Nilai-Nilai Kementerian Keuangan .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia.....	2
D. Aspek Strategis .....	5
E. Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	29
<b>BAB IV  PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
▪ LAMPIRAN 1    : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	
▪ LAMPIRAN 2    : PERJANJIAN KINERJA	

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Surakarta dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Surakarta secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan alat kendali serta berfungsi sebagai *feedback* untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menetapkan visi untuk tahun 2020-2024 adalah *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Visi tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. RKT Tahun 2022 berfungsi sebagai rencana kerja operasional dan kuantitatif yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Bahwa KPKNL Surakarta pada Tahun Anggaran 2022 ini sedang berusaha untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai tindak lanjut keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

yang telah diraih KPKNL Surakarta pada tahun 2019. Sebagai predikat tertinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada publik, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, KPKNL Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dan inovasi demi tercapainya predikat tersebut. Tetapi untuk tahun 2022 ini KPKNL Surakarta belum berhasil meraih predikat tersebut dan akan berupaya secara maksimal meraih predikata WBBM Tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja tahun 2022, KPKNL Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,57%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three*, dengan rincian sebanyak 18 (delapan belas) IKU hijau, 1 (satu) IKU Kuning dan 1 (satu) IKU abu-abu. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Surakarta sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Surakarta tahun 2022 dan menjadi tolok ukur kegiatan di tahun berikutnya. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Surakarta, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kami sampaikan terima kasih juga kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPKNL Surakarta yang telah memberikan data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami akan menerima dan mempertimbangkan saran/usulan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja tahun berikutnya.

Kepala Kantor  
  
Adi Wibowo

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. Target dan Realisasi

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2022 merupakan ikhtisar Capaian Kinerja KPKNL Surakarta selama tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian kinerja selama tahun 2022 pada KPKNL Surakarta, sehingga laporan ini dapat berfungsi sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Misi DJKN.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surakarta tahun 2022, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 21 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta tahun 2022.

Capaian kinerja 20 (dua puluh) yang tersebut adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)			35,16%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			117,19%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	50%	128,76%	120,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	50%	114,38%	114,38%
	Customer Perspective (20%)			22,51%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			120,00%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	50%	124,57%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	50%	127,74%	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			105,08%
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	100%	105,08%	105,08%
	Internal Process Perspective (25%)			28,37%

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			115,11%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	24%	116,46%	116,46%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	33%	126,98%	120,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	24%	107,50%	107,50%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	19%	114,63%	114,63%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	100%	196,53%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			113,80%
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	50%	107,60%	107,60%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	50%	199,99%	120,00%
7	Edukasi yang Efektif			103,38%
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	100%	103,38%	103,38%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			115,20%
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100%	115,20%	115,20%
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti			Abu-abu
	Learning & Growth Perspective (25%)			28,53%
9	SDM yang Kompeten			120,00%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
10	Organisasi yang Fit For Purpose			112,97%
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	33%	109,28%	109,28%
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	33%	121,81%	120,00%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	33%	109,62%	109,62%
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			109,40%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	50%	98,81%	98,81%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	50%	177,11%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>114,57%</b>

## **B. Langkah-langkah Antisipatif**

Langkah-langkah antisipatif ke depan yang harus dilakukan oleh KPKNL Surakarta untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2023 mendatang, antara lain adalah:

1. Terus meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;
2. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang, serta sosialisasi piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, tata cara penyerahan dan pengurusannya;
4. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
5. Mengintensifkan upaya pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang untuk meningkatkan produktivitas lelang;
6. Sosialisasi layanan permohonan lelang online kepada *stakeholders* lelang;
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penilai melalui diklat maupun *knowledge sharing* untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
8. Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada seksi-seksi/unit lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
9. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal;
10. Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. KPKNL Surakarta yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPKNL Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Salah satu azas umum penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran instansi.

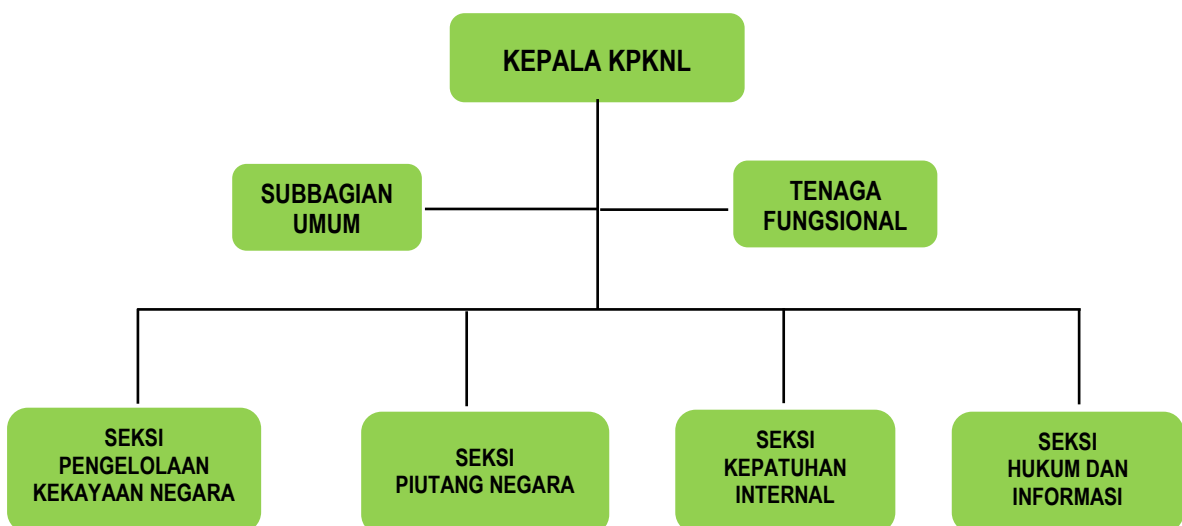
## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan

negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Struktur Organisasi KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdiri dari :



### C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Surakarta didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

## 1. Sarana dan Prasarana

Sarana berupa sebidang tanah dan gedung kantor yang cukup representatif dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setempat dikenal dengan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Sumber, Surakarta. Selain itu, KPKNL Surakarta juga memiliki tanah seluas 1.043 m<sup>2</sup> yang berasal dari penyerahan KPPN Surakarta berikut 7 (tujuh) buah bangunan rumah negara yang pada tahun 2018 lalu telah direnovasi. Tanah tersebut terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 44 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Jalan Melon Raya Gang Blewah XIII, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan perkantoran di antaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya.

Adapun prasarana yang ada antara lain adalah:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan roda 2	4	4		-
2	Kendaraan roda 4	5	4	1	-
3	Komputer dan laptop	74	64	10	-
4	Perangkat Pendukung Komputer	44	23	21	-

Sarana dan prasarana yang ada tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Surakarta sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin maupun kepangkatan dan keahlian dengan sebaran di masing-masing seksi sebagai berikut :

### Komposisi SDM berdasar Kepangkatan

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jumlah
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	IV	1	-	-	1	1	1	1	5
2	III	-	12	7	4	6	3	6	38
3	II	-	2	-	-	-	-	1	6
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	14	7	5	7	4	8	46

### Komposisi SDM berdasar Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	Laki-laki	1	9	5	3	5	3	5	31
2	Perempuan	-	5	2	2	2	1	3	15
Jumlah		1	14	7	5	7	4	8	46

### Komposisi SDM berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Kepala Kantor							Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	S-2	1	-	1	1	2	1	2	8
2	D-IV/ S-1	-	5	4	4	2	1	5	21
3	D-III	-	4	2	-	3	1	1	11
4	D-I	-	2	-	-	-	1	-	3
5	SLTA	-	3	-	-	-	-	-	3
Jumlah		1	14	7	5	7	4	8	46

### Komposisi SDM berdasar Usia

No	Usia	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	18 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
2	31 - 40	-	7	5	3	3	2	5	25
3	41 - 50	1	5	2	1	2	2	3	16
4	Diatas 50	-	2	-	1	2	-	-	5
Jumlah		1	14	7	5	7	4	8	46

### Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	Pejabat Lelang	-	-	-	-	-	-	3	3
2	Penilai	1	4	3	1	-	3	5	17
3	Jurusita	1	2	-	1	1	-	-	5
4	Pemeriksa	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	25

### Komposisi Pegawai Per Subbagian/Seksi

	Umum	PKN	PN	HI	KI	Jml
Eselon III	-	-	-	-	-	-
Eselon IV	1	1	1	1	1	5
Pelaksana	13	6	4	6	3	32
Jumlah	14	7	5	7	4	37

#### D. Aspek Strategis

Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan merupakan implementasi sekaligus antisipasi dalam menghadapi dinamika perkembangan organisasi. Pada cetak biru transformasi kelembagaan tersebut, aspek strategis DJKN meliputi inisiatif strategis dalam fungsi perbendaharaan dan fungsi *special mission*. Fungsi perbendaharaan atau fungsi pengelolaan kekayaan Negara meliputi kegiatan penilaian, inventarisasi dan

pengelolaan kekayaan Negara. Sedangkan *special mission* merujuk pada fungsi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagai instrumen investasi pemerintah. Pada level KPKNL, aspek strategis dalam fungsi perbendaharaan lebih berperan. Aspek strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Surakarta sebagai pengelola kekayaan negara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Surakarta. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada nilai manfaat ekonomi dan utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai asset manager, KPKNL Surakarta mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen penerbitan SUKUK. Fokus kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya dalam menggerakkan sektor ekonomi mikro yang terdampak Covid19. Saat ini titik berat kegiatan pengelolaan kekayaan Negara adalah memberikan kemudahan dan penyesuaian tarif dalam rangka pemanfaatan BMN oleh UKM, melakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK) guna efisiensi belanja pemeliharaan serta masih dilakukannya identifikasi dan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN menuju tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

#### 2. Memberikan Pelayanan Penilaian

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang penilaian adalah memberikan pelayanan penilaian dalam rangka mendapatkan nilai wajar untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nilai likuidasi untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk keperluan pemanfaatan BMN.

#### 3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari piutang instansi pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai Penyerah Piutang di wilayah kerja KPKNL Surakarta antara lain sebagai berikut:

- Direktorat PKNSI Kantor Pusat DJKN
- RS Ortopedi dr. Soeharso Surakarta
- RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten
- RSUP Sardjito Yogyakarta
- RSUD Moewardi Surakarta
- RSJD Surakarta
- RSUD Bagas Waras Klaten
- RSUD Pandanarang Boyolali
- Pemda Kabupaten Wonogiri dan Kab. Klaten
- Kemenristekdikti
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian UKM dan Koperasi
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

#### 4. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis KPKNL Surakarta di bidang pelayanan lelang adalah memberikan pelayanan permohonan lelang dari para pengguna jasa lelang (*stake holder*). Lelang yang dilaksanakan adalah lelang eksekusi maupun non eksekusi sebagai sarana jual beli yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surakarta sebagai instansi vertikal DJKN di daerah diharapkan menjadi akselerator agar lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat, sehingga menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

#### 5. Memberikan kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam memberikan pelayanan di bidang piutang negara dan lelang, KPKNL Surakarta memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KPKNL Surakarta juga turut berperan menyumbang PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan Negara yang berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

### **E. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Surakarta tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Perencanaan Kinerja
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV. Penutup

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja diperlukan untuk menentukan arah kegiatan dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

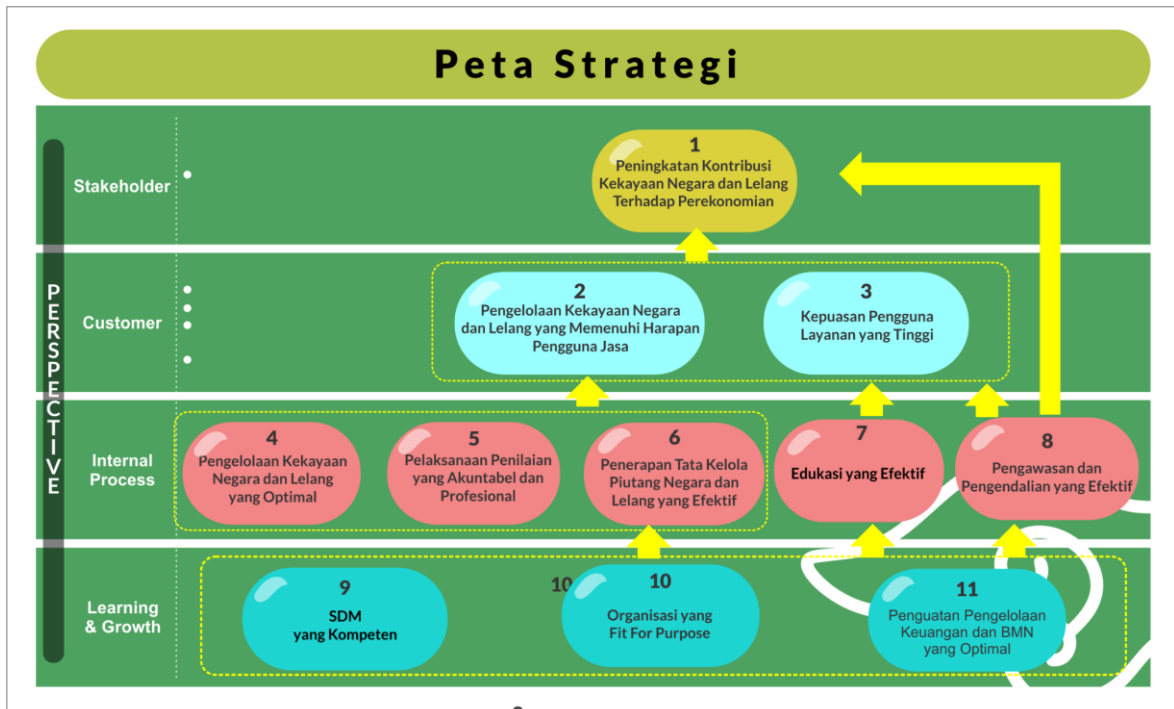
Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka ditetapkanlah misi KPKNL Surakarta sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Surakarta telah menetapkan 11 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang Fit For Purpose;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

## Peta Strategi KPKNL Surakarta Tahun 2022



Peta strategi KPKNL menetapkan 4 perspektif, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*.
2. *Customer Perspective*, berisi ekspektasi dari *customer*/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan.
3. *Internal Process Perspective*, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.
4. *Learning and Growth Perspective*, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategi KPKNL tahun 2022 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Surakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

## SASARAN STRATEGIS DAN IKU

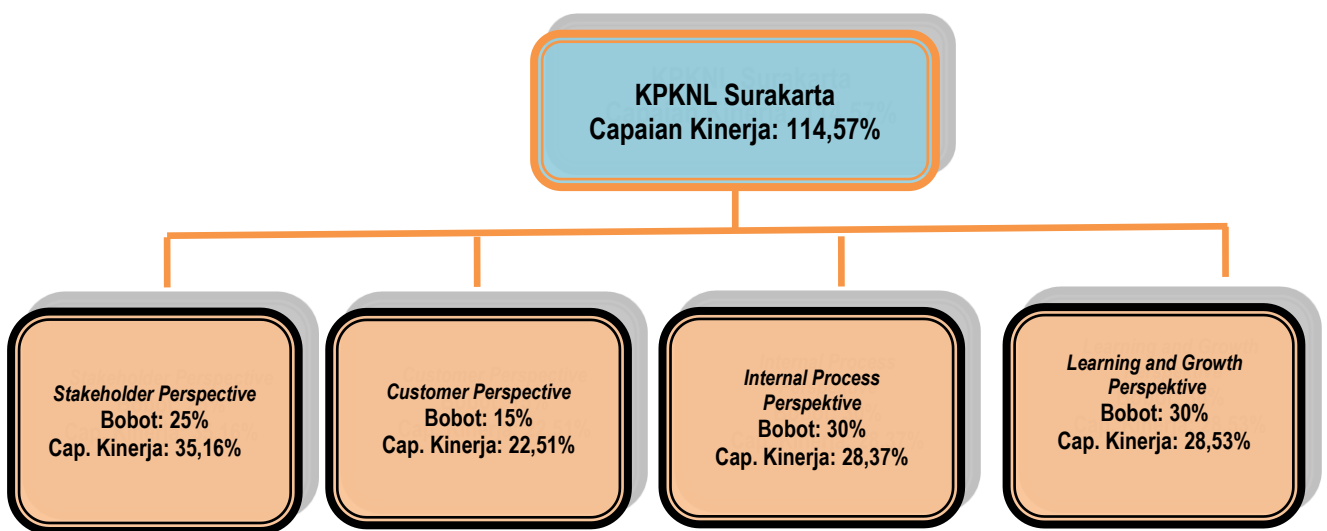
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,33
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,55
		11a-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp245.281.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp5.981.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3. Pengelolaan Aset	Rp239.300.000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp1.585.733.000,00</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp70.000.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.509.261.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1.480.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp4.992.000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membanding antara target/rencana dengan capaian/realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surakarta tahun 2022 adalah 114,57%. NKO tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Sebagaimana telah disebutkan pada BAB II, pada tahun 2022 KPKNL Surakarta telah menetapkan 11 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2022, 19 (delapan belas) IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi  $\geq 100\%$ ), 1 (satu) IKU berstatus Kuning dan 1 (satu) IKU abu-abu. Rincian capaian kinerja atas 10 (sepuluh) SS dan 22 (dua puluh dua) IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)			35,16%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			117,19%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	50%	128,76%	120,00%

1b-CP	Persentase produktivitas lelang	50%	114,38%	114,38%
	Customer Perspective (20%)			22,51%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			120,00%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	50%	124,57%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	50%	127,74%	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			105,08%
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	100%	105,08%	105,08%
	Internal Process Perspective (25%)			28,37%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			115,11%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	24%	116,46%	116,46%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	33%	126,98%	120,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	24%	107,50%	107,50%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	19%	114,63%	114,63%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	100%	196,53%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			113,80%
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	50%	107,60%	107,60%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	50%	199,99%	120,00%
7	Edukasi yang Efektif			103,38%
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	100%	103,38%	103,38%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			115,20%
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100%	115,20%	115,20%
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti			Abu-abu
	Learning & Growth Perspective (25%)			28,53%
9	SDM yang Kompeten			120,00%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
10	Organisasi yang Fit For Purpose			112,97%

10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	33%	109,28%	109,28%
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	33%	121,81%	120,00%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	33%	109,62%	109,62%
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			109,40%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	50%	98,81%	98,81%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	50%	177,11%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>114,57%</b>

Penjelasan atas capaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta tahun 2022, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara yang optimal :

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian/Realisasi	
	(%)	(RpJuta)	(%)	(RpJuta)
Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Rp21.433.953.000	128,76%	Rp27.598.438.699

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase produktivitas lelang	36.00%	41,18%	114,38%

#### **1.a. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Realisasi IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan hasil sebagai berikut:

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	14,82%	56,17%	56,17%	94,56%	94,56%	128,76%	128,76%	
Capaian	148,18%	187,23%	187,23%	157,61%	157,61%	128,76%	128,76%	

Kegiatan penghasil PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PNBP Pengelolaan BMN	6.626.953.000	10.808.793.246	163%
PNBP Piutang Negara	207.000.000	249.501.765	121%
PNBP Lelang	14.600.000.000	16.540.143.688	113%

Tercapainya target PNBP Pengelolaan BMN sebesar 163% adalah sebagian besar berasal dari pemanfaatan berupa sewa Rp3.455.305.579,- , pemindahtanganan penghapusan Rp6.969.931.371,- dan Rampasan Rp 383.556.296,-.

PNBP Piutang Negara sebesar 121 % adanya pembayaran/pelunasan piutang Negara, serta adanya program keringanan hutang.

PNBP Lelang yaitu 113% berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (termasuk uang jaminan pembeli wanprestasi) dan Bea Lelang Pegadaian.

IKU REALISASI PNBP		2021	2022	SELISIH
a.	PNBP Pengelolaan BMN	8.406.136.209,00	10.808.793.246,00	2.402.657.037,00
b.	PNBP Piutang Negara	121.647.420,00	249.501.765,00	127.854.345,00
c.	PNBP Lelang	11.763.775.297,18	16.540.143.688,00	4.776.368.390,82
<b>JUMLAH</b>		<b>20.291.558.926,18</b>	<b>27.598.438.699,00</b>	<b>7.306.879.772,82</b>



Realisasi IKU Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang berupa PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang untuk tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp 7.306.879.772,82.

### 1.b. Persentase produktivitas lelang

Realisasi IKU ini berasal dari tingkat pelaksanaan lelang laku dari total frekuensi lelang, adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Frekuensi lelang Laku Secara keseluruhan	-	1.029	-
	Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan	-	2.499	-
	<b>% Lelang laku keseluruhan</b>	30,00%	41,18%	114.38%

Frekuensi lelang sepanjang tahun 2022 pada KPKNL Surakarta sebanyak 2.499 kali, dengan total lelang yang laku sebanyak 1.029 kali. Sehingga realisasi produktivitas lelang KPKNL Surakarta pada tahun 2022 sebesar 41,18%. Tercapainya target ini banyak berasal dari Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Pengadilan dan Lelang Sukarela.

Namun demikian, masih terdapat pelelang yang tidak memenuhi target produktivitasnya secara pribadi.

### Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	124,57%	124,57%
Realisasi Tingkat Penurunan outstanding piutang negara	100%	127,74%	127,74%

### 2.a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi IKU Persentase Pokok Lelang, dengan hasil sebagai berikut:

Realisasi IKU ini berasal dari pokok lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Pegadaian di wilayah KPKNL Surakarta pada tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	12,07%	52,27%	52,27%	87,77%	87,77%	124,57%	124,57%	
Capaian	60,33%	130,67%	130,67%	125,38%	125,38%	124,57%	124,57%	

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp334.000.000.000,00, Realisasi IKU tersebut sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp416.071.105.598,00 yang terdiri dari:

- Rp349.925.144.898 (Pelelang KPKNL)
- Rp66.145.960.700 (Pegadaian)

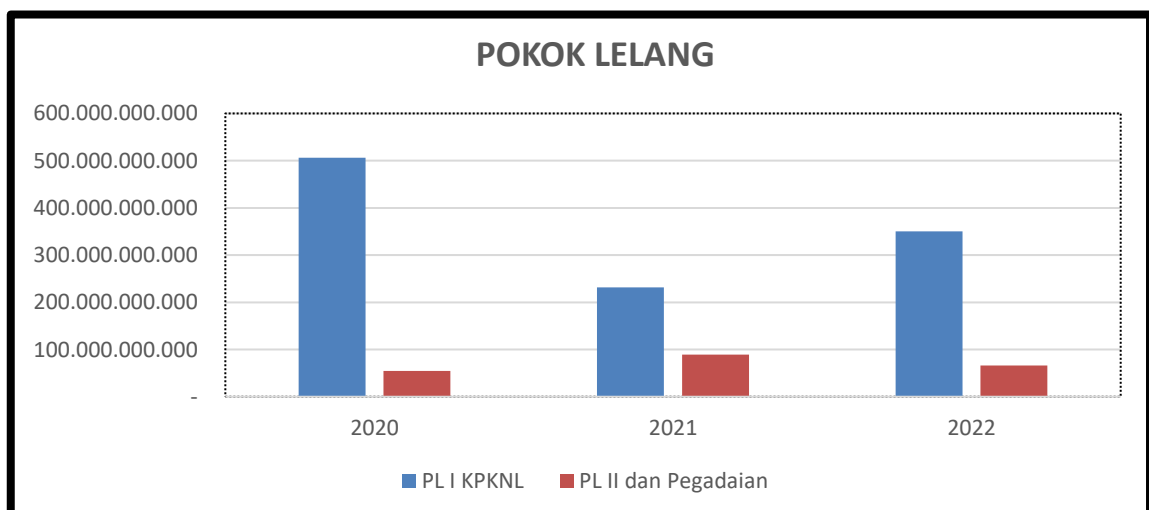
Sehingga realisasi hasil lelang KPKNL Surakarta sebesar **124,57 %** dari target.

Tercapainya Pokok lelang Pejabat lelang Kelas I sebesar 126,78% adalah berasal pelaksanaan lelang Eksekusi Kepailitan, Eksekusi Hak Tanggungan dan Penetapan Pengadilan, Penghapusan BMN dan lelang Kayu Perhutani.

### Pokok Lelang KPKNL Surakarta dan Pegadaian

TAHUN 2020 – 2022

TAHUN		2020	2021	2022
a.	PL I KPKNL	505,908,883,921.00	231,775,144,747.00	349.925.144.898,00
b.	PL II dan Pegadaian	54,467,768,100.00	89,179,606,200.00	66.145.960.700,00
<b>JUMLAH</b>		<b>560,376,652,021.00</b>	<b>320,954,750,947.00</b>	<b>416.071.105.59,00</b>



Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Surakarta untuk tahun 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2021, tetapi masih lebih kecil daripada tahun 2020. Pencapaian tahun 2020 yang tinggi karena banyak lelang yang bernilai besar dari lelang eksekusi harta pailit dan eksekusi Hak Tanggungan.

Sedangkan untuk pokok lelang yang berasal dari pegadaian relatif stabil kenaikannya maupun penurunan tiap tahun.

## 2.b. Realisasi Tingkat Penurunan outstanding piutang negara

Realisasi IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang negara diperoleh dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara, dengan hasil sebagai berikut:

Outstanding BKPN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Penurunan outstanding piutang negara	5.130.743.243,00	6.554.521.438,00	127,74%

Tercapainya target Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar 127,74% berasal Outstanding BKPN s.d. 2022 per 31-12-2022 adalah 251 BKPN. Target Tingkat Outstanding Piutang Negara Tahun 2022 sebesar Rp5.130.743.243,00. Capaian target berasal dari PSBDT, Pelunasan dan pembayaran angsuran.

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah Rp6.554.521.438,00 (127,74%), capaian ini semakin meningkat dengan adanya beberapa Penanggung Hutang penyerahan sd tahun 2022 yang telah optimal pengurusannya dan berdasarkan penelitian lapangan ditindaklanjuti dengan PSBDT, adanya pembayaran angsuran dan pelunasan hutang sehingga menambah penurunan outstanding di TW IV 2021 sebesar Rp 2.238.224.650,22. Bahwa dalam pengurusan piutang Negara tersebut KPKNL Surakarta telah berupaya untuk melakukan Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara, Di masa Pandemi COVID-9 dilakukan penagihan langsung sekaligus dengan penyampaian Surat Paksa dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan serta dengan mengirimkan surat penyelesaian hutang kepada Negara yang ditujukan kepada PH/PjH dan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang kepada Penanggung Hutang dan / atau Penjamin Hutang penyerahan dari instansi pemerintah pusat.

### Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan pengguna layanan	4.33	4.55	105,08%

Nilai indeks kepuasan pengguna layanan didapatkan dari kompilasi perhitungan hasil survei kepada para stakeholder pada seksi teknis, dengan data sebagai berikut :

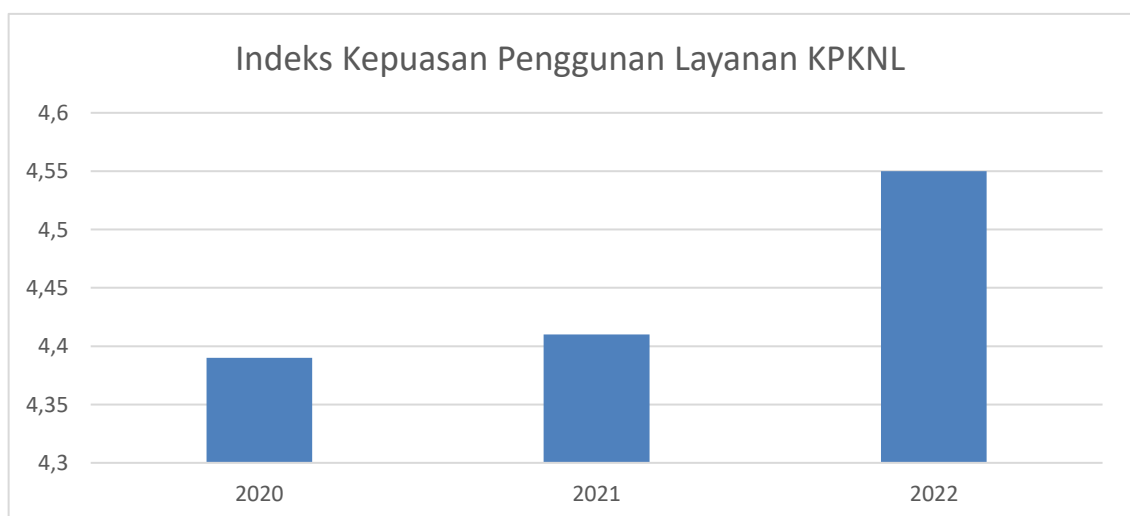
- Indeks kepuasan Seksi PKN : 4,50
- Indeks kepuasan Seksi Pelayanan Penilaian : 4,45
- Indeks kepuasan Seksi Piutang Negara : 4,89
- Indeks kepuasan Seksi Pelayanan Lelang : 4,35

Realisasi sebesar 4.55 diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan KPKNL Surakarta kepada pengguna layanan (*stakeholder*), terutama atas penyelesaian layanan unggulan KPKNL Surakarta. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan terkait pelayanan KPKNL kepada pengguna layanan. Capaian IKU tersebut mengindikasikan bahwa layanan KPKNL telah mampu memberi kepuasan/memenuhi harapan pengguna layanan/*stakeholder*.

#### Indek Kepuasan Penggunan Layanan KPKNL

TAHUN 2020– 2022

TAHUN	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Penggunan Layanan KPKNL	4.39	4.41	4.55



Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan KPKNL Surakarta untuk tahun 2020 s.d. tahun 2022 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, Hal ini menandakan bahwa KPKNL Surakarta Senantiasa berusaha untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna layanan.

#### Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 4 (empat) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	76%	116,46%
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	126,98%	126,98%
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	107,50%	107,50%
Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	114,63%	114,63%

##### 4.a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	76%	116,46%

KPKNL Surakarta	Nama Sasaran Strategis : 4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max/TLK
Realisasi	-	77%	77%	73%	73%	76%	76%	
Capaian	-	153%	153%	132,78%	132,78%	116,46%	116,46%	

Target tahun 2022 sebanyak 544 NUP satker Non Kemenkeu lingkungan KPKNL Surakarta untuk pengukuran SBSK serta 97 NUP satker Non Kemenkeu untuk optimalisasi dan penggunaan SBSK.

Tahun 2022, KPKNL SURakarta telah menyelesaikan pengukuran terhadap – 544 NUP untuk pengukuran dan 97 NUP untuk optimalisasi BMN.

#### 4b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Sertifikasi BMN berupa tanah pada kementerian dan lembaga Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	126.98%	126.98%

Target tahun 2022 sebanyak 430 bidang tanah, s.d Q4 KPKNL telah menyelesaikan 546 dari target sertifikasi.

#### 4.c Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara terhadap BKPN yang masih menjadi Outstanding KPKNL Surakarta, Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	240	258	107.5%

penyelesaian BKPN untuk Tahun 2022 sebesar 240 BKPN, sedangkan realisasi s.d. Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 258 BKPN (107,5%).

#### 4.d Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

IKU ini berasal dari kegiatan pemanfaatan BMN untuk Fortofolio pada kementerian dan lembaga Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Evaluasi Kinerja	50	60	120%
2	Rekomendasi	108	118	109,26%
	Jumlah	158	178	114,63%

Target Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 158 aset, dengan capaian tahun 2022 sebanyak 178.

## Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,66%	196,53%

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Dari target yang ditetapkan sebesar 19%, Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,66%.

## Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU, dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%	98.99%	107,60%
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,00%	199.99%

### 6.a. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 92% dari realisasi frekuensi lelang, dengan catatan target e-Auction adalah minimal sebesar **92%** dari realisasi frekuensi lelang.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, dari **1.492** frekuensi lelang telah dilaksanakan *e-auction* sejumlah **1,477** kali, dan lelang *e-conventional auction* sejumlah 0, sehingga realisasi triwulan IV sebesar **98,99%**.

Masih terdapat 15 Frekuensi lelang yang tidak menggunakan *e-auction* dengan rincian:

- 14 frekuensi lelang kayu perhutani dan;
- 1 lelang penghapusan BMN Kopassus.

## 6.b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Realisasi IKU ini berasal dari selisih pencatatan/pembukuan antara laporan yang dibuat KPKNL Surakarta dengan data aplikasi OMSPAN yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, adapun capaian IKU ini adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10.00%	0 %	199.99%

Adapun rincian deviasi data PNBP tersebut adalah sebagai berikut:

Deviasi PNBPN		Deviasi PNBPL	
Focus PN	OM SPAN	Dropbox	OMSPAN
Rp249.501.765,00	Rp249.501.765,00	Rp15.217.224.474	Rp 15.217.224.475
<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	

Realisasi IKU deviasi untuk PNBPN yang berasal dari Bea Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Bead PPN) adalah 0,00%, sedangkan PNBPL yang berasal dari Bea Lelang 0,00% berasal dari setoran-setoran bea lelang yang belum teridentifikasi, maka untuk realisasi IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN secara total keseluruhan adalah 0,00% dari Total PNBPN Bead PPN dan Bea Lelang.

Untuk kedepannya KPKNL Surakarta berusaha mempertahankan tertib Administrasi dan pelaporan sehingga keakuratan informasi Data PNBPN Fungsional DJKN dapat diandalkan.

## Sasaran Strategis 7: Edukasi yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU, dengan capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90	93.04	103.37%

Target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi KPKNL Surakarta tahun 2022 sebesar 90. Capaian pada tahun 2021 tercapai sebesar 93.04 atau 103,37% dari target.

No	Seksi	Nilai Edukom	
		Semester I	Semester II
1	Seksi PKN	90,45	99,2
2	Seksi PN	93,84	93,34
3	Seksi Pelayanan Lelang	86	92,52
Rata-rata		90,68	95,40

Tahun 2022 (rata-rata nilai semester I dan II)	93.04
--	-------

Layanan edukasi dan komunikasi ini dilaksanakan oleh tiga seksi yang berhubungan langsung dengan stakeholder/penggunaan layanan KPKNL Surakarta. Pada tahun 2022, meskipun pandemi Covid-19 telah mereda, layanan tetap dilaksanakan secara kombinasi antara tatap muka dan virtual/telepon dalam bentuk kegiatan yang berupa:

1. Edukasi dan komunikasi pada saat satker konsultasi tatap muka dan telepon (Seksi PKN).
2. Edukasi dan komunikasi terkait pengurusan piutang Negara dilakukan pada saat petugas melayani/ bertemu langsung stakeholder baik penyerah piutang, penanggung hutang dan juga pengguna jasa lainnya terkait piutang Negara dengan cara mengisi kuesioner. (Seksi PN).
3. Edukasi dan komunikasi pada saat pemohon lelang konsultasi tatap muka dan telepon (Seksi Pelayanan Lelang ).

### Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU,. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	97.92%	115.20%
Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti			Abu-abu

#### 8.a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Realisasi IKU ini berasal dari tingkat tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L	-	52	
2	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L	-	42	
3	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022	-	52	

4	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022	-	44	
<b>Capaian IKU</b>		<b>85 %</b>	<b>97,92%</b>	<b>115,20%</b>

Target tahun 2021 sebesar 85%. Capaian Tahun 2021 sebesar 97,92%. Yang berarti hampir semua persetujuan yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta telah ditindaklanjuti semuanya oleh Satker Kementerian/lembaga.

#### 8.b. Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-

Pada tahun 2022 tidak ada temuan/rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti oleh KPKNL Surakarta.

#### Sasaran Strategis 9: SDM yang kompeten

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU,. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100.00%	120.00%

IKU ini adalah dalam rangka pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh KPKNL Surakarta. Dari 46 pegawai pelaksana yang sudah memenuhi standar kompetensi adalah sejumlah 46 (semua sudah memenuhi).

#### Sasaran Strategis 10: Organisasi yang *Fit For Purpose*

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU,. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85	92.89	109.28%
Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	97.45	121.81%

Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	98.66	109.62%
--	----	-------	---------

#### 10.a. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK / WBBM

Bahwa tahun 2022 ini KPKNL Surakarta mengikuti penilaian sebagai Kantor yang berpredikat WBBM, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85	92.89	109.28%

Target nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM sebesar 85. IKU ini dihitung secara tahunan. Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan, KPKNL Surakarta mendapatkan nilai 92.89. Namun demikian belum lolos untuk menyandang predikat WBBM dikarenakan tidak terpenuhinya standar minimal per area pada Lembar Kerja Evaluasi. KPKNL Surakarta akan berusaha kembali meraih predikat WBBM tersebut pada tahun 2023.

#### 10.b. Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Target nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja KPKNL Surakarta tahun 2022 sebesar 75. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80	97.45	121.81%

Reviu pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang meliputi kualitas dokumentasi perencanaan kinerja, pelaksanaan/eksekusi kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta edukasi pengelolaan kinerja.

Berdasarkan penilaian dari Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, nilai reuiu pengelolaan kinerja KPKNL Surakarta tahun 2021 adalah sebesar 97,45 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai	Bobot	Nilai Setelah Pembobotan
1	Perencanaan	100,00	25%	25,00
2	Pelaksanaan/Eksekusi	96,51	30%	28,95
3	Monitoring dan Evaluasi	100,00	30%	30,00
4	Edukasi	90,00	15%	13,50
<b>NILAI HASIL REVIU</b>				<b>97,45</b>

### 10.c. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Target efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator KPKNL Surakarta tahun 2021 sebesar 80. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	98.66	109.62%

FGD telah dilakukan 4 kali dengan capaian sebagai berikut:

- Triwulan I: 98,22
- Triwulan II: 97,57
- Triwulan III: 99,71
- Triwulan IV: 99,14

Sehingga rata-rata indeks pada tahun 2022 sebesar 98,66 atau 109.62% dari target tahunan.

### Sasaran Strategis 11: Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.98%	100.50%
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	177,11%	177,11%

#### 11.a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.98%	100.50%

IKU ini mengukur kualitas dalam pengelolaan anggaran yaitu kesesuaian dalam perencanaan dan pembelanjaan anggaran. Beberapa kegiatan yang diukur pada IKU ini adalah Capaian Belanja, tingkat efisiensi, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belanja, penyelesaian tagihan belanja dan data kontrak. Secara umum, kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Surakarta cukup baik dan sudah mencapai target yang ditetapkan.

### 11.b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2022 sebesar 100%. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	177,11%	177,11%

IKU ini diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Parameter	Target (Indeks)	Capaian (Indeks)	%
1	IPA	Ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal dan RKBMN	4	4	100%
2		Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan	3	4	115%
Persentase Capaian IPA, formula: $((4+4/2)/3,5*100\%)$					114,29%
3	ITKP	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	-	-	239,93%
<b>Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan</b>					<b>177,11%</b>

kualitas dalam pengelolaan anggaran yaitu kesesuaian dalam perencanaan dan pembelanjaan anggaran. Beberapa kegiatan yang diukur pada IKU ini adalah Capaian Belanja, tingkat efisiensi, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belanja, penyelesaian tagihan belanja dan data kontrak. Secara umum, kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Surakarta cukup baik dan sudah mencapai target yang ditetapkan.

### B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, KPKNL Surakarta mendapatkan anggaran total sebesar Rp1.831.014.000,00. Anggaran tersebut seluruhnya terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.831.014.000,00. Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp0,00, dan belanja pegawai sebesar Rp0,00 karena untuk belanja pegawai sudah tersentralisasi di Kantor Pusat DJKN.

Realisasi anggaran tahun 2022 dapat dijelaskan sesuai table berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja pegawai	0	0	0%
Belanja barang	1.831.014.000	1.747.292.804	98%
Belanja modal	0	0	0
Jumlah Anggaran	1.831.014.000	1.747.292.804	95,43%

**Perbandingan Anggaran KPKNL Surakarta  
Tahun 2020 s.d. 2022**

TAHUN		2020	2021	2022
a.	Belanja Pegawai	2,070,685,000.00	-	-
b.	Belanja Barang	1,943,954,000.00	1,695,675,000.00	1.831.014.000,00
c.	Belanja Modal	22,000,000.00	29,740,000.00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4,036,639,000.00</b>	<b>1,725,415,000.00</b>	<b>1.831.014.000,00</b>



Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, bahwa untuk tahun 2022 ini mengalami kenaikan anggaran dibandingkan tahun 2021 namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Namun demikian dengan terbatasnya anggaran program kerja KPKNL Surakarta masih dapat terlaksana.

## **BAB IV PENUTUP**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai KPKNL Surakarta tahun 2022 ini adalah sebesar 114,57%. Capaian NKO ini merupakan hasil kerja keras seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Surakarta. Selain itu, dari total 21 (dua puluh satu) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta, 19 (sembilan belas) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning.

1. IKU yang memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja  $\geq 100\%$  (hijau) sebanyak 19 (Sembilan belas) IKU, yaitu:
  - a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
  - b. Persentase produktivitas lelang
  - c. Persentase Realisasi Pokok Lelang
  - d. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
  - e. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL
  - f. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
  - g. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan
  - h. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
  - i. Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
  - j. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
  - k. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
  - l. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
  - m. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
  - n. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
  - o. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
  - p. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)
  - q. Nilai review pengelolaan kinerja
  - r. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
  - s. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
2. IKU yang memperoleh hasil  $> 80\%$  dan  $< 100\%$  (kuning) sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;
3. IKU yang memperoleh hasil  $> 80\%$  (merah) sebanyak nihil; dan
4. IKU yang tidak dapat diperhitungkan (berstatus abu-abu) sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan Negara
  - a. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satker K/L dalam pengelolaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;
  - b. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
  - c. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan penguasaan peraturan pengelolaan BMN melalui kegiatan *capacity building*, diklat teknis, maupun kegiatan lainnya.
2. Pengurusan piutang Negara
  - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang;
  - b. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
3. Pelayanan lelang
  - a. Mengintensifkan pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang;
  - b. Meningkatkan kapasitas para Pelelang secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai peraturan/ketentuan lelang;
  - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelelang secara intensif.
  - d. Sosialisasi layanan permohonan lelang *online*.
  - e. Penggalian Potensi lelang UMKM.
4. Pelayanan penilaian
  - a. Melakukan *knowledge sharing* dan diskusi internal tentang penilaian untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
  - b. Diklat penyegaran tentang penilaian.
5. Bagian Umum
  - a. Asistensi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada Seksi lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
  - b. Konsultasi pengelolaan DIPA dengan Kanwil Perbendaharaan dan/atau KPPN.
6. Kepatuhan Internal

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal.
7. Hukum dan Informasi

Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tugas fungsi KPKNL Surakarta kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat menjadi cermin dan evaluasi serta diharapkan memacu kinerja organisasi yang lebih baik, dan secara eksternal Laporan Kinerja ini menjadi indikator kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap *stakeholders*. Harapannya adalah masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari eksistensi dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Surakarta.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
- LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**  
**PERIODE TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2022**

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)							35,16%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							117,19%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	128,76%	14%	50%	128,76%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	41,18%	14%	50%	114,38%	114,38%	hijau
	Customer Perspective (20%)							22,51%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	124,57%	14%	50%	124,57%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	127,74%	14%	50%	127,74%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							105,08%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,33	4,55	21%	100%	105,08%	105,08%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							28,37%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							115,11%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	76%	14%	24%	116,46%	116,46%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	126,98%	19%	33%	126,98%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	107,50%	14%	24%	107,50%	107,50%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	114,63%	11%	19%	114,63%	114,63%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,66%	14%	100%	196,53%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,80%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	98,99%	14%	50%	107,60%	107,60%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	199,99%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							103,38%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	93,04	14%	100%	103,38%	103,38%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							115,20%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	97,92%	14%	100%	115,20%	115,20%	hijau
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M							abu-abu
	Learning & Growth Perspective (25%)							28,53%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							112,97%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	P/M	85	92,89	14%	33%	109,28%	109,28%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	97,45	14%	33%	121,81%	120,00%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90,00	98,66	14%	33%	109,62%	109,62%	hijau
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							109,40%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,50%	94,36%	14%	50%	98,81%	98,81%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	177%	14%	50%	177,11%	120,00%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>114,57%</b>	<b>hijau</b>



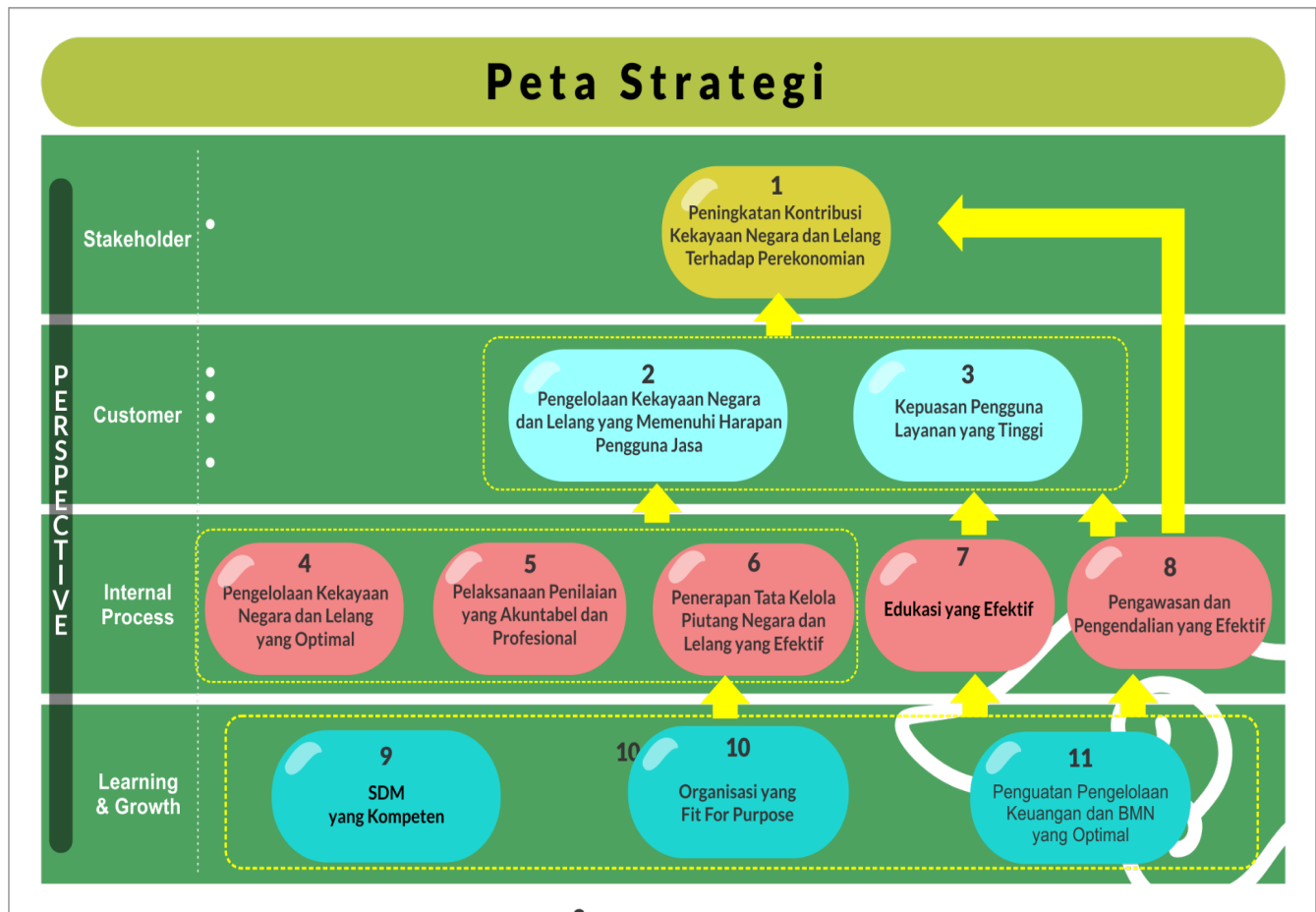
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 8/KN.21/2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG SURAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SURAKARTA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,33
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85



No.	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

### Kegiatan

### Anggaran

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	5.981.000
2. Pengelolaan Aset	Rp	209.836.000
3. Legislasi dan Litigasi	Rp	70.000.000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.509.261.000
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	1.480.000
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	4.992.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mahmudsyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Wibowo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SURAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,33	4,33
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
<b>6</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>7</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	90	90	-	90	90	90
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
<b>9</b>	<b>SDM yang Kompeten</b>							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>10</b>	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85	
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80	
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90	
<b>11</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>								
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%	

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Wibowo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian  Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Peningkatan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.  2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi underutilized/idle yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya.	Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial  Rencana Optimalisasi BMN	Hasil Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial  Penyampaian rekomendasi kepada direktorat teknis	12 bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
 Adi Wibowo



## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Adi Wibowo	NAMA	Mahmudsyah
NIP	197503261995031001	NIP	196407161991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,33
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%



15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
17	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
18	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
19	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
20	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

## B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Wibowo  
NIP 197503261995031001

Semarang, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mahmudsyah  
NIP 196407161991031001



# PASTI ISO!

*Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Integritas, Inovatif dan memberi Solusi*



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG SURAKARTA**

Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta, Kode Pos 57136  
Telepon 0271-723644, Faksimili 0271 723693